

# **PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KEANDALAN LAPORAN KEUANGAN (Studi Kasus BPKD Kabupaten Luwu)**

**Putri Yangsi<sup>1</sup>, A.Dahri Adi Patra LS<sup>2</sup>, Saharuddin<sup>3</sup>**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Univesritas Muhammadiyah Palopo  
Jl. Jend Sudirman No.Km.03, Binturu, Wara Sel, Kota Palopo  
Sulawesi Selatan 91992  
E-mail: [Putriyangsi@gmail.com](mailto:Putriyangsi@gmail.com)

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD kabupaten Luwu. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Luwu sebanyak 48 orang. Sampel dalam penelitian ini diambil menggunakan sampling jenuh yaitu jumlah sampel sama dengan jumlah populasi yang ada. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi lapangan dan penelitian kepustakaan. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pertanyaan tertutup (koesioner), dengan terlebih dahulu melakukan pengujian dengan uji validitas dan reliabilitas. Analisis data menggunakan Metode Analisis Deskriptif, Analisis Regresi Linear Sederhana, Koefisien Determinasi dan Uji T *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan.

**Kata kunci :** Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Keandalan Laporan Keuangan.

## **Abstract**

*This study aims to determine the effect of the regional financial accounting system on the reliability of financial reports at the Luwu Regency BPKD. The population in this study are employees who work at the office of the Regional Financial Management Agency of Luwu Regency as many as 48 people. The sample in this study was taken using saturated sampling, namely the number of samples equal to the existing population. Data collection techniques used are field studies and library research. The instrument used in this study was a closed question (questionnaire), by first testing the validity and reliability. Data analysis using Descriptive Analysis Method, Simple Linear Regression Analysis, Coefficient of Determination and T Test Test *Statistical Packages for Social Science* (SPSS). The results of this study indicate that the regional financial accounting system has a significant effect on the reliability of financial statements.*

**Keywords:** *Regional Financial Accounting System And Financial Report Reliability.*

## **1.1 Latar Belakang**

Sistem akuntansi pemerintah daerah merupakan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang sangat pesat. Dalam sistem akuntansi pemerintahan ditetapkan entitas pelaporan dan entitas akuntansi yang

menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintah daerah. Tujuan utama adanya perubahan-perubahan kebijakan pada sistem akuntansi keuangan daerah untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih, berorientasi pada hasil,

profesionalitas, dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta dapat diandalkan.

Berdasarkan PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Maka dalam hal ini setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi menyelenggarakan sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah yang meliputi serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengiktisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran pendapatan dan biaya daerah serta pemerintah adalah entitas pelapor (*reporting entity*) yang harus membuat laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawabannya karena pemerintah menguasai dan mengendalikan sumber – sumber yang signifikan, penggunaan sumber – sumber tersebut oleh pemerintah dapat berdampak luas bagi kesejahteraan dan ekonomi rakyat, dan terdapat pemisahan antara manajemen dan pemilik sumber – sumber tersebut.

Sistem akuntansi keuangan daerah harus memenuhi laporan keuangan pemerintah dengan prinsip prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti SAK sesuai dengan peraturan pemerintah no.71 tahun 2015, laporan keuangan kemudian disampaikan kepada DPRD/ DPD dan masyarakat umum setelah di audit oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang saling berhubungan yang disusun sesuai dengan satuan skema yang menyeluruh yang ditunjuk untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan oleh pihak intern dan pihak ekstern pemerintah daerah dalam mengambil keputusan (Abdul Halim, 2017).

Masalah sistem akuntansi keuangan daerah dan keandalan laporan keuangan di indonesia merupakan suatu hal yang

menarik untuk dikaji lebih dalam dan lebih lanjut, karena pada kenyataannya laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih banyak disajikan data -data yang tidak sesuai, selain itu masih banyak penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dapat dipercaya, maka pemerintahan harus memiliki sistem akuntansi yang handal pula. sistem akuntansi yang lemah dapat menyebabkan pengendalian internal lemah dan pada akhirnya laporan keuangan yang dihasilkan juga kurang handal dalam mengambil sebuah keputusan. Informasi akuntansi keuangan pemerintah daerah disajikan selengkap mungkin mencakup semua informasi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Adapun keandalan merupakan kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar atau valid. Dalam hal ini memungkinkan ketersediaan data secara aproksimasi tanpa mempengaruhi realibilitas secara material dengan begitu akan meningkatkan manfaat secara keseluruhan. Keandalan informasi dalam laporan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material dan menghasilkan informasi laporan keuangan yang harus dibuat sedemikian rupa sehingga laporan keuangan yang dihasilkan mempunyai kemampuan dalam informasi bahwa informasi tersebut benar atau valid (Trisnani, 2018).

Fenomena yang sering terjadi dalam menyusun laporan keuangan yaitu masih kurangnya penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dalam menyusun laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dihasilkan tidak dapat diandalkan dikarenakan pemerintah dalam menyusun laporan keuangan daerah kurang memperhatikan penggunaan SAP pada laporan keuangan daerah sehingga laporan keuangan tidak optimal dan maksimal dalam

pengelolaan aset daerah untuk melihat perkembangan dari tahun yang lalu dengan tahun yang sekarang.

Berdasarkan latar belakang masalah dengan kajian empiris atau fakta bahwa penelitian ini merupakan lanjutan yang dilakukan oleh penelitian terdahulu, alasan penulis mendasari kebenaran penelitian ini dikarenakan pada penelitian terdahulu masih kurang yang mengamati dan meneliti antara sistem akuntansi keuangan daerah dengan keandalan laporan keuangan khususnya di BPKD Kabupten Luwu serta pada instansi ini terdapat perangkat yang mengabungkan laporan keuangan satuan kerja daerah sehingga menghasilkan laporan keuangan pemerintahan.

Hal ini yang mendorong peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Keandalan Laporan Keuangan (Studi Kasus pada BPKD Kabupaten Luwu)”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu.

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menambah pengetahuan tentang pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu, serta sebagai bahan perbandingan antara teori nyata sebagai referensi untuk penelitian lebih lanjut.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1.4.2.1 Bagi Penyusun**

Setelah melakukan penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan menjawab masalah masalah yang telah diidentifikasi pada bagian bagian sebelumnya.

#### **1.4.2.2 Bagi Akademisis**

Peneliti diharapkan lebih menambah referensi untuk penelitian selanjutnya dibidang pemerintahan.

#### **1.4.2.3 Bagi Instansi Pemerintah**

Hasil penelitian ini di harapkan dapat membrikan solusi bagi pemerintah untuk menerapkan sistem akuntansi keuangan dalam menyusun laporan keuangan daerah yang lebih valid dan akurat serta dapat diandalkan.

## **1.5 Ruang Lingkup Dan Batas penelitian**

Ruang lingkup dalam penelitian ini yaitu sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu sistem yang dari beberapa indikator antara lain kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, pencatatan akuntansi berdasarkan pencatatan yang berlaku umum dan pembuatan laporan keuangan secara prodik. Sedangkan keandalan laporan keuangan merupakan kemampuan informasi laporan keuangan yang terdiri dari beberapa indikator antara lain penyajian fakta secara jujur, dapat di uji, netralisasi. Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian terfokus pada pokok permasalahan yang ada serta pembahasannya, sehingga peneliti tidak akan menyimpang dari tujuan yang telah

ditetapkan. Oleh karena itu peneliti membatasi penelitian ini pada variabel bebas yaitu sistem akuntansi keuangan daerah sementara variabel terikat adalah keandalan laporan keuangan.

## TINJAUAN PUSTAKA

### 1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

*Theori Agency* dapat dimaknai dengan adanya kewajiban pihak pemegang amanah (*agen*) untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban antara pihak prinsipal dengan agen dimana prinsipal memberikan kekuasaan pada agen untuk membuat keputusan, kewenangan untuk membuat diskresi keputusan tersebut bersifat terutang dari prinsipal (Abdul Hakim, 2017).

Dalam hal ini pemerintah berfungsi sebagai agen yang diberi kewenangan untuk melaksanakan kewajiban tertentu yang ditentukan oleh para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipal, baik secara langsung atau tidak langsung melalui wakil-wakilnya. Dalam hubungan keagenan, pemerintah sebagai agen harus melaksanakan apa yang menjadi kepentingan para pengguna informasi keuangan pemerintah sebagai prinsipalnya.

### 2.2 Teori Kepatuhan (*Chompliance Theory*)

Teori kepatuhan dapat mendorong seseorang untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku dan cenderung dimaknai sebagai kepatuhan perilaku individu yang mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka serta berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu karena selain merupakan suatu kewajiban

menyampaikan laporan keuangan tepat waktu, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Herliana, 2016).

Dapat disimpulkan bahwa teori kepatuhan dapat menggerakkan seseorang agar dapat lebih mematuhi peraturan yang berlaku serta berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara andal, juga akan sangat bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan.

### 2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Sistem akuntansi keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai kumpulan dari subsistem-subsistem yang didalam setiap subsistem tersebut terdapat tahap-tahap, prosedur, perangkat, dan peraturan yang harus diikuti dalam rangka mengumpulkan dan mencatat data keuangan, kemudian mengolah data tersebut menjadi berbagai laporan untuk pihak luar maupun internal pemerintah daerah yang dijadikan sebagi informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak – pihak yang memerlukan (Mahmudi 2016).

Maka dengan ini dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem akuntansi yang terdiri dari seperangkat kebijakan, standar, dan prosedur yang dapat menghasilkan laporan yang relevan, andal, dan tepat waktu untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan oleh pihak internal dan eksternal pemerintah daerah untuk mengambil keputusan ekonomi.

#### 2.3.1 Ruang Lingkup Sistem Akuntansi Daerah

Menurut peraturan Menteri dalam Negri No 64 Tahun 2013 sitem akuntansi keuangan daerah meliputi :

##### 2.3.1.1 Sistem akuntansi PPKD

Sistem akuntansi PPKD mencakup teknik pencatatan, pengakuan, dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan

LRA, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi, penyusunan laporan keuangan PPKD serta penyusunan laporan keuangan konsolidasian pemerintah daerah.

#### 2.1.3.1.2 Sistem akuntansi SKPD

Sistem akuntansi SKPD mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan LO, beban, pendapatan LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD.

### 2.3.2 Prosedur Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Prosedur sistem akuntansi keuangan daerah sekurang kurangnya mencakup empat prosedur menurut Halim, (2012:84) antara lain :

#### 2.3.2.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas

Prosedur akuntansi penerimaan kas meliputi pencatatan, pengolongan, peringkasan dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan penerimaan kas

2.3.2.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas  
Prosedur akuntansi pengeluaran kas meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan pelaporan keuangan dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD yang berkaitan dengan pengeluaran kas.

#### 2.3.2.3 Prosedur Akuntansi Aset tetap

Prosedur akuntansi asset merupakan serangkaian proses baik manual maupun komputerisasi, mulai dari pencatatan dan pelaporan akuntansi dalam proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD atas perolehan hingga pemeliharaan rehabilitas, penghapusan, pemindahan tangganan, perubahan klasifikasi, dan penyusutan terhadap asset yang dikuasai atau digunakan SKPD. Prosedur akuntansi asset digunakan sebagai alat pengendali dalam pengelolaan asset yang dikuasai atau digunakan oleh SKPD.

#### 2.3.2.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas

Prosedur akuntansi selain kas merupakan serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Akuntansi selain kas dapat berupa akuntansi piutang, akuntansi persediaan, akuntansi investasi, akuntansi kewajiban, dan akuntansi ekuitas.

#### 2.3.2.5 Penyajian Laporan Keuangan

Secara garis besar tujuan umum penyajian laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta sebagai bukti pertanggung jawaban dalam pengelolaan.

### 2.3.3 Indikator Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Ada beberapa indikator sistem akuntansi keuangan daerah menurut Sella Yunita (2019) yaitu sebagai berikut :

#### 2.3.3.1 Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sistem akuntansi keuangan daerah harus mengacu pada standar akuntansi pemerintahan yang berlaku pada saat ini yaitu berbasis akrual. Basis akrual yaitu mengakui transaksi keuangan pada saat terjadinya yaitu ketika sudah menjadi hak atau kewajibannya meskipun belum diterima atau dikeluarkan kasnya.

#### 2.3.3.2 Pencatatan akuntansi berdasarkan standar pencatatan yang berlaku umum.

Sistem akuntansi keuangan daerah harus dilakukan berdasarkan pencatatan yang berlaku umum yaitu dimana setiap transaksi keuangan yang terjadi dilakukan analisis transaksi di sertai bukti transaksi serta pencatatan transaksi harus dilakukan secara kronologis. Adapun komponen laporan keuangan meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo, neraca, laporan operasional, laporan arus kas,

laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan.

#### 2.3.3.3 Pembuatan laporan keuangan secara periodik

Sistem akuntansi keuangan daerah menyusun laporan keuangan daerah untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan. Laporan keuangan yang dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah. Laporan keuangan yang dibuat juga harus dilaporkan secara periodik guna kepentingan pengambilan keputusan.

### 2.4 Keandalan Laporan Keuangan

Keandalan laporan keuangan merupakan informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian bebas dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan dan merugikan pengguna laporan keuangan (Pradana, Setiawati, 2018).

Dari pengertian diatas dapat di simpulkan secara sederhana bahwa keandalan laporan keuangan adalah suatu penerapan perancangan pada komponen sehingga komponen dapat melakukan fungsinya dengan baik, tanpa kegagalan, dan dapat memberikan informasi laporan keuangan yang dapat dipercaya terus menerus kepada publik.

#### 2.4.1 Indikator Keandalan Laporan Keuangan

Indikator keandalan laporan keuangan yang dikemukakan oleh Pradana dan Setiawati (2018) yaitu sebagai berikut :

##### 2.4.1.1 Penyajian fakta secara jujur

Penyajian fakta secara jujur harus digambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

##### 2.4.1.2 Dapat diuji

informasi keuangan yang disusun berdasarkan konsep-konsep dasar akuntansi sehingga dapat diuji kebenarannya, data dan fakta sesuai dengan laporan tertulis.

##### 2.4.1.3 Netralitas

kualitas laporan keuangan yang penting karena merupakan pertimbangan sehat karena adanya ketidakpastian kelengkapan dapat dibandingkan antar periode dan antar pemerintah. Netralitas berarti bahwa informasi tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu.

### 2.4.2 Karakteristik Keandalan Laporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 karakteristik keandalan laporan keuangan meliputi :

#### 2.4.2.1 Penyajian yang jujur

Agar dapat diandalkan informasi dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

#### 2.4.2.2 Dapat diverifikasi

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

#### 2.4.2.3 Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

#### 2.4.2.4 Subtansi mengungguli bentuk

Jika informasi dimasukkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi atau peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan subtansi dan realita.

#### 2.4.2.5 Pertimbangan sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan perkiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau benar tidak dinyatakan terlalu rendah.

#### 2.4.2.6 Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan karena itu tidak dapat diandalkan dan kurang relevansinya.

### 2.5 Hipotesis

Diduga bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap keandalan laporan keuangan (studi pada BPKD Kabupaten Luwu).

### METODE PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, metode analisis data kuantitatif adalah metode yang menggunakan perhitungan angka angka yang nantinya akan dipergunakan untuk mengambil suatu keputusan didalam memecahkan suatu masalah. Sumber data yang digunakan adalah data Primer. Data Primer adalah data yang didapatkan dan diperoleh langsung dari objek yang diteliti.

### HASIL PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial nilai signifikan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar  $0,000 < t\text{-hitung}$  sebesar  $8,037 > t\text{-tabel}$  sebesar  $1,678$ , dengan demikian hipotesis diterima. Ini berarti bahwa variabel sistem akuntansi keuangan daerah signifikan dan berpengaruh nyata terhadap variabel keandalan laporan keuangan.

Sejalan juga dengan Ruhana, Haim Usman, Samsul Bahri (2020) Pengaruh penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap relevansi dan keandalan laporan keuangan daerah Kota Palopo. hasil penelitian Ruhana, Haim Usman, Samsul Bahri menunjukkan bahwa pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah terhadap relevansi laporan keuangan berpengaruh signifikan sedangkan pengaruh sistem

akuntansi keuangan daerah terhadap keandalan laporan keuangan berpengaruh tetapi tidak signifikan, hal ini dilihat dari nilai sig lebih besar dari 0,0.

## KESIMPULAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, analisis data serta pembahasan diatas maka disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keandalan laporan keuangan pada BPKD Kabupaten Luwu sehingga hipotesis diterima.

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, maka di sarankan:

1. Agar sistem akuntansi keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan sebaiknya sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan agar laporan keuangan yang dihasilkan akurat dan benar.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat dijadikan untuk mengembangkan penelitian ini dan menambahkan variabel variabel lain yang berpengaruh dengan variabel penelitian serta mengkaji tentang sistem akuntansi keuangan dan keandalan laporan keuangan .

## DAFTAR PUSTAKA

- Artika, Y., Zulfahridar, Z., & Hariadi, H. 2016. *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hulu (Studi pada Skpd)*. Diss. Riau University.
- Christian S, R. (2017). *Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan*

- Keuangan (Studi Kasus Pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung)* (Doctoral dissertation, Universitas Widyatama).
- Djiwandono, P. I. 2015. *Meneliti Itu Tidak Sulit*. Yogyakarta:Deepublish
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete dengan Program SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2016. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta, Salemba Empat
- Halim, Abdul. 2017. *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul dkk. 2012. *Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi Keempat. Salemba Empat. Jakarta.
- Hakim, Abdul. 2017. *Kualitas Laporan Keuangan*. edisi terbaru.
- Herliana, Widya. 2016. “*Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2014)*”, Skripsi, Universitas Bakrie, Jakarta
- Hidayat, Alimul AA. 2015. *Metode Penelitian dan Teknik Analisis Data*. Jakarta: Salemba Medika.
- Komasari, Warih 2017. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada SKPD Kabupaten Bantul Bagian Akuntansi dan Keuangan)*.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN
- Mokoginta, N., Lambey, L., & Pontoh, W. (2017). *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Mulyadi. 2016. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Muslikha. 2015. “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan aporan Keuangan Daerah Pemerintahan Kota urakarta” *Jurnal Akuntansi FEB UMS*.
- Pradana, A. A. P., & Setiawati, E. (2018, October). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengendalian Iintern Terhadap Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Dinas Kabupaten Boyolali)*. In *Seminar Nasional dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi* (pp. 1-13).
- Purba, R. B. (2018). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap AakuntabilitasTKeuangan pada badan keuangan daerah kabupaten Tanah Datar*. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Rafar, T. M., Fahlevi, H., & Basri, H. (2015). *Pengaruh kompetensi pengelola keuangan dan akuntabilitas terhadap kinerja pengelolaan*



- keuangan daerah (Studi pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Utara). Jurnal Administrasi Akuntansi: Program Pascasarjana Unsyiah, 4(2).*
- Rahmat, D. (2021). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Sistem Pengendalian Internal, Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus: SKPD Kota DKI Jakarta). SI Akuntansi, 1-21.*
- Republik Indonesia, 2013. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, 2011. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah.
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, 2003. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara .
- Saryono. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta: Nuha Medika.
- Sari, A. P., Anisma, Y., & Rofika, R. (2017). *Pengaruh Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengawasan Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sari, R. P., & Suryanti, F. (2019). Determinan keandalan pelaporan keuangan pemerintah pada SKPD Kabupaten Kulon Progo. *ACCOUNTING GLOBAL JOURNAL*.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Trisnani, E. D., Dimiyati, M., & Paramu, H. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern terhadap keandalan laporan keuangan dengan mediasi penatausahaan aset tetap. *BISMA: Jurnal Bisnis Dan Manajemen, 11(3)*, 271-282.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. Jurnal Akuntansi, 5(2)*, 88–98.
- Yunita, S., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Lampung, R. I. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Insani Dan Penerapann Sistem Aakuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat)*.

